

TESIS

**PENYELESAIAN PEMBAGIAN WARIS YANG DIDASARKAN PADA  
PERJANJIAN DISERTAI KUASA PENGELOLAAN ATAS SUATU  
OBJEK WARIS**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 147 K/Pdt/2017)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Magister  
Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Andalas*



Oleh:

**SILVIA TRISTANTI SUTJIADI**

**NIM. 2220122034**

Pembimbing:

**Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.Hum**

**Dr. Muhammad Hasbi, S.H., M.H.**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2024**

**PENYELESAIAN PEMBAGIAN WARIS YANG DIDASARKAN PADA  
PERJANJIAN DISERTAI KUASA PENGELOLAAN ATAS SUATU  
OBJEK WARIS  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 147 K/PDT/2017)**

(Silvia Trisanti Sutjiadi, 2220122034, Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas  
Hukum, Universitas Andalas, 117 halaman, 2024)

**ABSTRAK**

Pada dasarnya tiap-tiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, dan dalam bentuk apapun. Hal ini sebagaimana yang tercermin dalam Asas Kebebasan Berkontrak. Setiap perjanjian harus dilandaskan dengan itikad baik. Atas dasar itulah Tuan Gandra Quin mengadakan perjanjian dengan anak lelaki tertuanya yakni Philips Gan. Perjanjian yang diadakan tersebut adalah dalam bentuk Akta Perikatan Jual Beli dan Kuasa Pengelolaan atas objek jual beli yang bernama Wisma Soliga. Wisma Soliga ini juga dijadikan tempat tinggal baik oleh keluarga Tuan Gandra Quin, Philips Gan, serta Venny Gan. Menjadi masalah karena objek jual beli tersebut merupakan harta warisan dari Ibu Philips Gan yang belum terbagi semenjak ia meninggal dunia. Terdapat salah seorang ahli waris yakni Venny Gan yang tidak bersedia menandatangani pelepasan hak atas warisan ibunya tersebut. Setelah meninggalnya Tuan Gandra Quin, Venny Gan bersama saudaranya Stevenson mengajukan gugatan untuk menuntut hak waris mereka atas Wisma Soliga tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimanakah pertimbangan Hakim Agung dalam memutus sengketa pembagian waris dengan adanya perjanjian disertai dengan kuasa pengelolaan? 2) Bagaimanakah kepastian hukum atas pembagian waris dengan adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli disertai kuasa pengelolaan yang dibuat oleh pewaris? Metode penelitian yang akan digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan masalah secara deskriptif analisis dengan sumber data sekunder. Adapun hasil dari penelitian ini adalah 1) Dalam KUH Perdata tidak ada perbedaan antara ahli waris baik itu laki-laki maupun perempuan, maka ia berhak atas bagian yang sama besar terkait warisan orang tuanya. Dalam adat Tionghoa terdapat keistimewaan bagi anak laki-laki khususnya bagi anak laki-laki tertua dimana hanya anak laki-laki yang berhak mewaris dari orang tuanya. Hakim Agung berpandangan hukum adat Tionghoa tidak tertulis dan harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Oleh karenanya Hakim Agung memutuskan bahwa objek waris Wisma Soliga tersebut harus dibagi 3(tiga) bagian sama besar diantara ahli waris dengan segala konsekuensi yuridisnya. 2) Tidak ada aturan hukum di Indonesia yang melarang jual beli antara ayah dan anak. Akan tetapi dalam hal jual beli yang dilakukan adalah objek waris yang belum terbagi maka hal ini harus mendapatkan persetujuan dari seluruh anak-anaknya selaku ahli waris golongan I yang sah. Tanpa adanya persetujuan dari seluruh ahli waris untuk melepaskan hak warisnya atas objek tersebut maka jual beli tersebut menjadi tidak sah. Oleh karenanya perjanjian peralihan hak atas objek waris tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

**Kata Kunci: Pembagian Waris, Perjanjian Disertai Kuasa, Objek Waris.**

**SETTLEMENT OF INHERITANCE DISTRIBUTION BASED ON AN  
AGREEMENT ACCOMPANIED BY MANAGEMENT AUTHORITY  
OVER AN INHERITANCE OBJECT  
(STUDI OF SUPREME COURT DECISION NUMBER 147 K/PDT/2017)**

*(Silvia Trisanti Sutjiadi, 2220122034, Thesis, Master of Notary, Faculty of Law,  
Andalas University, 117 Pages, 2024)*

**ABSTRACT**

Essentially, every individual is free to enter into agreements with anyone and in any form. This is reflected in the Principle of Freedom to Contract. Every agreement must be based on good faith. Based on this principle, Mr. Gandra Quin entered into an agreement with his eldest son, Philips Gan. The agreement took the form of a Sales and Purchase Deed and a Management Power of Attorney regarding an object of sale named Wisma Soliga. Wisma Soliga also served as a residence for both Mr. Gandra Quin's family, Philips Gan, and Venny Gan. A problem arose because the object of sale was an inheritance from Philips Gan's mother, which had not been divided since her passing. One of the heirs, Venny Gan, was unwilling to sign the waiver of rights over her mother's inheritance. After the death of Mr. Gandra Quin, Venny Gan and her brother Stevenson filed a lawsuit to claim their inheritance rights over Wisma Soliga. The research questions in this study are: 1) How is the Supreme Court's consideration in deciding inheritance distribution disputes with the existence of an agreement accompanied by a power of attorney? 2) How is the legal certainty of inheritance distribution with the existence of a Sale and Purchase Agreement accompanied by a power of attorney made by the testator? The research method used will be normative juridical with a descriptive analytical problem approach, utilizing secondary data sources. The results of this study are: 1) In the Civil Code, there is no distinction between male and female heirs, meaning they are entitled to an equal share of their parent's inheritance. However, under Chinese customary law, there is a special privilege for male children, particularly the eldest son, who alone has the right to inherit from their parents. The Supreme Court Judge held the view that Chinese customary law is unwritten and should be adapted to the changing times. Therefore, the Supreme Court decided that the inherited property, Wisma Soliga, must be divided into three equal shares among the heirs, with all the legal consequences attached. 2) There is no law in Indonesia prohibiting a sale between a father and his child. However, if the object of the sale is an inheritance that has not yet been divided, it must be approved by all the children as the legitimate first-class heirs. Without the consent of all heirs to waive their rights to the inheritance, the sale is deemed invalid. Therefore, the transfer agreement concerning the inheritance object was annulled by the Supreme Court.

**Keywords: Distribution of Inheritance, Agreement with Power of Attorney, Object of Inheritance.**